

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Mansur, M. Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Syafrudin, Ateng. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Tambunan, Witarsa. *Manajemen Kerja Sama Antar Daerah*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Thomson dan Perry. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2007.

### Jurnal:

- Daud, B. S. dan Supoyono. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3, (2019): 352-365.
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 2, (2016): 181-194.

- Fahlevi. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Nasional." *Journalica of Law* 12, No. 3, (2015): 177-191.
- Fitrah, Faldi Rahmat Fitrah, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Prosiding Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2021): 355-359.
- Kartiko, Asto Y. Kartiko, Biyan Habibie, Dimas D. Hartawan, dan Fikri R. Fadila. "Implementasi Kerja Sama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik tentang Informasi Statistik Keimigrasian Berdasarkan Prespektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 1 (2021): 48-67.
- Nugroho, Adi Purwo, Juanrico A. S. Titahelu, dan Julianus E. Latupeirissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Bacarita Law Journal* 3, No. 2, (2023): 92-102.
- Resa, Meysasi Kirana dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 2 (2021): 161-171.
- Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Vyavahara Duta (Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Hukum)* 14, No. 1 (2019): 1-7.
- Siahaan, Alamanda P. P. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, (2023): 1-11.
- Sukawantara, Gege A., Anak A. S. L. D., Luh P. Suryani. "Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 1 (2020): 220-226.
- Sumirat, Iin Ratna. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia," *Jurnal Al Ahkam* 13, No. 2 (2017): 130-142.

#### **Peraturan perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026.
- Keputusan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2024-2027.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Nomor: 121/KPTS/DP3AP2KB/ VIII/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Tim Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Yogyakarta Tahun 2023.

### **Putusan Pengadilan:**

- Fatima Dwi Aryani binti (Alm.) Lukimin, Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 9 Agustus 2023.
- Giri Hastuti binti Tugimin, Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor, 13 Desember 2023.

Hita Marinda binti Iwan Arinianto, Temi Irfansyah bin Sulaeman, Muhamad Nazril Ilham bin (Alm.) Syapril Tanjung, Eko Kristianto bin Sucipto, Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 20 Maret 2024.

Maisuri binti Ishak Manik, Muhammad Farhan bin Syahroni, Tri Ayu Candini binti Sopian S. K., Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk, Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Juli 2024.

#### Internet:

- Admin Konferensi Pers Polresta Yogyakarta, “Polresta Yogyakarta Berhasil Ungkap 2 Kasus TPPO atau Eksploitasi secara Seksual terhadap Anak”, Tribata News Polresta Yogyakarta (Portal Berita Resmi Polresta Yogyakarta), diakses 5 Februari 2024, <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribata-news/online/detail/polresta-yogyakarta-berhasil-ungkap-2-kasus-tpo-atau-eksploitasi-secara-seksual-terhadap-anak.html>.
- Admin Konferensi Pers Polresta Yogyakarta, “Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta Tangkap 4 Pelaku TPPO Modus dipekerjakan sebagai PSK”, Tribata News Polresta Yogyakarta (Portal Berita Resmi Polresta Yogyakarta), diakses 24 Mei 2024, <https://www.polresjogja.com/2023/11/unit-ppa-polresta-yogyakarta-tangkap-4.html>.
- Admin Konferensi Pers Polresta Yogyakarta, “Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta Ungkap TPPO Berkedok Salon, Dua Anak Bawah Umur Jadi Korban”, Tribata News Polresta Yogyakarta (Portal Berita Resmi Polresta Yogyakarta), diakses 5 Februari 2024, <https://www.polresjogja.com/2023/07/unit-ppa-polresta-yogyakarta-ungkap.html>.
- Admin Konferensi Pers Polresta Yogyakarta, “Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta Berhasil Mengungkap Kasus TPPO dan Penganiayaan Terhadap Anak”, Tribata News Polresta Yogyakarta (Portal Berita Resmi Polresta Yogyakarta), diakses 5 Februari 2024, <https://www.polresjogja.com/2023/11/unit-ppa-satreskrim-polresta-yogyakarta.html>.
- Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, “Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan UU TPPO”, Kajian Publik, diakses 24 Mei 2024, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-293.pdf>.
- Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, “Hasil Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU TPPO yang Dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang”, Kajian Publik, diakses 5 Februari 2024, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-294.pdf>.
- Biro Hukum dan Humas (Admin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)), “Siaran Pers Nomor: B-286/SETMEN/HM.02.04/7/2023: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan”, PPID Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Website Resmi Kemen PPPA),

*diakses 5 Februari 2024, [https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi\\_serta\\_merta\\_detail/705](https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705).*

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, *diakses 25 Mei 2024,*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

### **Hasil Wawancara:**

Ardiani, Udiyati (Kepala UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, Kantor UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 15 Juli 2024.

Handayani, Catur Udi (Tenaga Ahli, Konselor Hukum UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, Kantor UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 16 Juli 2024.

Herawati (Pekerja Sosial Ahli Madya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)), wawancara dengan Anisah Karim, BPRSW Yogyakarta, 11 Juli 2024.

Kurnisih, Devi (Pekerja Sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)), wawancara dengan Anisah Karim, BPRSW Yogyakarta, 11 Juli 2024.

Rinawati, Ria (Kepala Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 10 Juli 2024.

Sawitri, Apri (Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta), wawancara dengan Anisah Karim, Polresta Yogyakarta, 4 Juli 2024.